

## **KEKUASAAN DAN PENDIDIKAN**

Musdiani

### **ABSTRAK**

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar, proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk dapat memiliki kekuatan spiritual, kecerdasan, ahklak mulia, serta keterampilan yang diperlukan, dalam masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan kekuasaan adalah pemerintah dengan birokrasi yang di pegang oleh seseorang atau kekuasaan lainnya. Dengan demikian antara pendidikan dan kekuasaan memiliki hubungan yang sangat erat dan akan saling mempengaruhi, setiap proses dari pendidikan selalu akan berhubungan dengan Kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang mengendalikan kekuasaan.

*Kata kunci : Pendidikan, Pemerintahan, dan Kekuasaan.*

## A. PENDAHULUAN

*Education is deeply implicated in the politics of culture. The curriculum is never simply a neutral assemblage of knowledge.... It is always part of a selective, tradition, someone's selection, some group's vision of legitimate knowledge. Micheal W. Apple, Cultural politics and Education, {1996}.*

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Kekuasaan adalah: pemerintah dengan birokrasi ataupun kekuasaan kaum konglomerat, atau kekuasaan yang dipegang oleh seseorang atau kekuasaan lainnya. Jika berbicara tentang masalah kekuasaan sangat menarik terutama dalam masyarakat modern, karena hampir seluruh aspek kehidupan manusia dipengaruhi oleh kekuasaan.

Dalam kehidupan sehari-hari kita diatur oleh berbagai jenis kekuasaan, seperti kekuasaan militer, kekuasaan ekonomi, kekuasaan politik, dan bermacam-macam kekuasaan lainnya. Diantara kekuasaan itu kekuasaan politik lah yang paling menonjol

dalam kehidupan masyarakat modern. Seorang sosiolog, Gianfranco Poggi, membedakan kekuasaan sosial kedalam tiga jenis yaitu : 1) kekuasaan politik, 2) kekuasaan ekonomi dan, 3) kekuasaan normatif atau idiologis.

## B. PEMBAHASAN

Batas-batas kekuasaan negara dan tantangan bagi masyarakat Indonesia baru. "*Another world is possible.*" *World Social Forum III*, Porto Alegre, 2003. Yang artinya, kebudayaan dunia tidak semata-mata ditentukan oleh satu kebudayaan yang dominan, yaitu kebudayaan barat, semua kebudayaan mempunyai status yang sama dan mempunyai *dignity* yang sama sebagai milik manusia yang beragam.

Keragaman merupakan suatu kenyataan sosial yang mempunyai nilai-nilai yang sama dari setiap masyarakat, pluralisme dan bukan dominasi dari satu kebudayaan terhadap kebudayaan lainnya. Masyarakat dunia mulai menyadari bahwa kesetaraan kebudayaan hanya dapat dilaksanakan melalui pendidikan. Maka lahir lah tuntutan *education for all*, yaitu pendidikan merupakan salah satu hak azasi manusia.

Jika pendidikan merupakan salah satu hak azasi manusia maka hal ini mulai dipermasalahkan apakah pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang dapat menyelenggarakan pendidikan.

Kekuasaan pemerintah dalam penentuan proses dan isi pendidikan tetap diperlukan, namun batas-batas kekuasaan pemerintah dalam manajemen pendidikan nasional haruslah tidak bertentangan dengan hak azasi manusia.

Reformasi pendidikan yang dihadapi oleh banyak negara-negara berkembang, juga dihadapi oleh negara-negara maju, yang masih mengenal segregasi antara pendidikan kelompok mayoritas dan kelompok minoritas, hal ini disebabkan oleh perubahan wajah dunia yang terbuka, termasuk perubahan profil kependudukan, dunia tanpa batas yang disebabkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi menuntut orientasi baru dalam dunia pendidikan.

Orientasi baru tersebut antara lain melihat praktis pendidikan sebagai bagian dari kegiatan kebudayaan global akan memberikan bentuk dan isi yang baru terhadap pendidikan. Kekuasaan dan pendidikan ternyata meminta perspektif baru dalam rangka kebudayaan yang sedang terbentuk. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sekarang ini perlu adanya, batas-batas kekuasaan pemerintah pusat dan daerah agar tetap merupakan upaya untuk mengembangkan potensi manusia dalam mewujudkan individualitas bersama-sama sesama warga negara untuk

mempertahankan kehidupan bersama yang disebut masyarakat bangsa.

### **Peranan Negara dalam Pembangunan Pendidikan.**

*"The role of government is to set the frameworks for service delivery, and not necessarily to supply the service itself".*  
Hedley Beare, *Creating the Future School*. 2002, hlm.66.

Pendidikan merupakan salah satu hak azasi manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pula dalam Amandemen ke-IV undang-undang dasar tersebut lebih diperjelas mengenai penyelenggaraan pendidikan yang merupakan salah satu hak azasi manusia yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan negara.

#### ▪ Peran Negara dalam Pendidikan.

Peran negara tidak dapat dipisahkan dalam proses pendidikan, sejak Plato maupun pakar pendidikan dalam kehidupan negara-negara modem, negara merupakan suatu unit berdasarkan kekuasaan. Michael W. Apple di dalam bukunya yang terkenal *Education and Power*, 1985. Menjelaskan bahwa politik kebudayaan suatu negara disalurkan melalui lembaga-lembaga pendidikan.

**PERUBAHAN PERAN NEGARA  
DALAM PENDIDIKAN**

PERAN	MASA LALU	SEKARANG & MASA DEPAN
Pemerataan Pendidikan	Berorientasi target	Berorientasi kualitas
Kualitas	Dicapai melalui evaluasi dan standarisasi semua melalui ujian terpusat dan kurikulum baku yang bersifat basional	Sebagai prioritas utama yang sesuai dengan kebutuhan daerah
Proses	Tidak dipentingkan; yang penting ialah tercapainya target kuantitatif	Sangat penting karena yang penting ialah perubahan tingkah laku dan "outcome" pendidikan
Metodologi	Indoktrinasi	Dialogis
Manajemen	Negara dan birokrasinya memegang peranan sentral	Manajemen berpusat pada institusi sekolah
Pelaksanaan servis pendidikan	Pelaku Utama	Pemerintah sebagai partner yang cukup menetapkan arah
Perubahan sosial	Terarah dan operatif	Demokratis dan <i>grass-root</i>
Perkembangan demokrasi	Menentukan bingkai kehidupan berdemokrasi terbatas pada prosedur	Mengembangkan perubahan tingkah laku demokratis secara substantif
Perkembangan sosial ekonomi masyarakat setempat	Bukan menjadi bahan pertimbangan penyusunan kurikulum	Salah satu komponen pokok penyusunan kurikulum
perkembangan nilai-nilai moral dan agama	Ditentukan oleh pemerintah pusat	Berakar dari budaya dan agama setempat
Nasionalisme	Pemaksaan dari atas dan bersifat formalistis. Mengabaikan identitas daerah	Pendekatan Multikultural
Pendanaan	Seluruhnya menanggung pembiayaan pendidikan. Dana sebagai alat pelestarian kekuasaan pemerintah	Selektif sebagai pemersatu nasional dalam pemerataan, kualitas, dan persatuan nasional
Pelaksanaan wajib belajar 9-12 tahun	Ditentukan secara terpusat oleh pemerintah pusat	Sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah. Pelaksanaannya secara bertahap sesuai dengan kondisi sosial ekonomi daerah

■ Perubahan Sosial dan Pendidikan.

Masyarakat dunia dewasa ini berubah sangat cepat, perubahan-perubahan sosial tersebut tentu menuntut pandangan-pandangan baru dalam pendidikan. Bahwa pendidikan tidak dapat dipisahkan dari perubahan sosial dan lembaga pendidikan itu sendiri merupakan bagian yang terintegrasi dengan perubahan sosial. Dalam sejarah pendidikan dikenal dua pandangan, yaitu pandangan yang statis dan pandangan yang dinamis. Pandangan yang statis melihat pendidikan sebagai sesuatu yang tetap tidak berubah sepanjang masa bahkan ada yang beranggapan bahwa pendidikan semata-mata merupakan suatu proses transmisi kebudayaan dan oleh sebab itu merupakan suatu proses yang menetap. Perspektif yang lain menunjukkan bahwa tidak ada suatu masyarakat yang statis tetapi terus-menerus berubah lambat atau cepat.

■ Pendidikan dan Demokrasi.

Apabila kita berbicara tentang demokrasi sebenarnya kita

berbicara tentang pendidikan, demikian kata John Dewey dalam *School and Society*. Pendidikan merupakan arena tempat tumbuh dan berkembangnya gaya hidup demokrasi.

Jika kita ingin membangun suatu masyarakat demokrasi dan suatu negara demokrasi maka kuncinya terletak pada sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang otoriter yang tidak mengembangkan cara-cara hidup demokrasi tidak mungkin akan tumbuh suatu masyarakat demokrasi.

Oleh sebab itu dalam upaya untuk membangun masyarakat yang terbuka dan demokratis usaha yang dilakukan ialah: melaksanakan suatu sistem pendidikan agar menjadi sarana tumbuhnya cara hidup demokratis. Penyelenggaraan, manajemen, proses belajar-mengajar semuanya dilaksanakan dalam suasana yang demokratis.

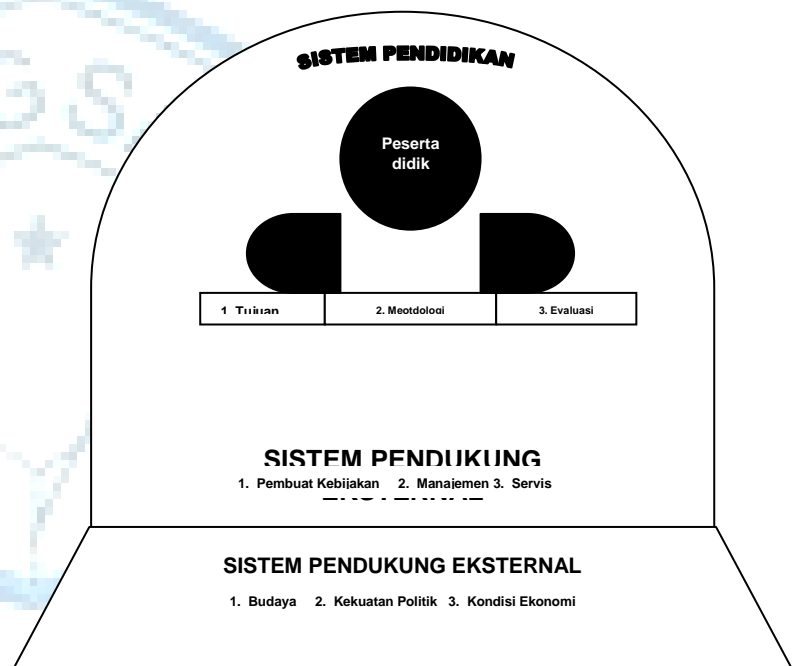
Dalam masyarakat yang demokrasi pendidikan adalah milik rakyat, dari dan untuk rakyat, pendidikan merupakan suatu sarana untuk menumbuhkan sikap demokratis dari masyarakat suatu bangsa untuk menumbuhkan rasa persatuan. Pembangunan dari suatu masyarakat hanya dapat terjadi apabila masyarakat memiliki kapital sosial, lembaga-lembaga yang teratur, dengan manajemen yang terbuka.

#### **Proses Pendidikan dan Peran Negara.**

1. Dalam perspektif mikro, yang dijadikan pusat perhatian ialah : peserta didik dalam proses belajar-mengajar, dimana

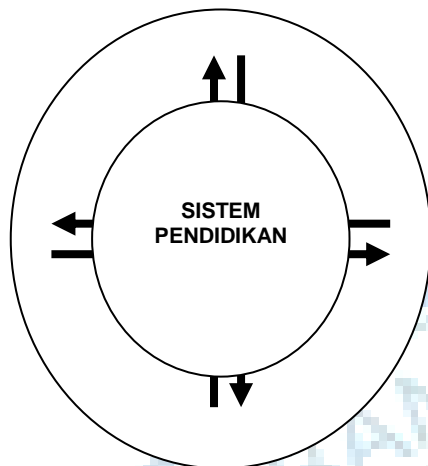
peserta didik merupakan titik sentral yang berhubungan dengan metodologi, evaluasi hasil belajar.

### **SISTEM PENDIDIKAN PERSPEKTIF MIKRO**



2. Perspektif studi kultural, sistem pendidikan merupakan bagian terintegrasi dari siste budaya, sosial, politik dan ekonomi sebagai sautu keutuhan.

## **SISTEM PENDIDIKAN PERSPEKTIF KULTURAL**



## **SISTEM BUDAYA SOSIAL POLITIK DAN EKONOMI**

### **Pendidikan di era globalisasi**

Aktivitas di masa pembangunan di era globalisasi, pada awalnya dimulai dari globalisasi dalam bidang informasi, di mana batas antar negara menjadi semakin maya, karena globalisasi informasi dapat menembus batas-batas wilayah tersebut. Globalisasi informasi pada akhirnya diikuti pula dalam bidang -bidang kehidupan lainnya, baik bidang ekonomi, politik, sosial budaya tak terkecuali bidang pendidikan mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Ciri utama kehidupan sosial di era global ini adalah proses perubahan yang sangat cepat yang sedang dialami oleh masyarakat kita. Karena pada hakekatnya setiap masyarakat itu dinamis. Perubahan masyarakat itu sebagian terdiri dari

perubahan yang sengaja, yang mana arah dan tujuannya telah direncanakan sehingga kita dapat mengantisipasi dampak perubahan yang ada. Pembangunan kita merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan umum, yaitu masyarakat yang berkepribadian produktif, cerdas, kreatif, dan inovatif, menuju terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, aman tentram dan damai.

Salah satu komponen pembangunan nasional kita adalah pembangunan dalam bidang pendidikan. Mohd Ansyar (1992:2) mengemukakan zaman kita di era global ini, yang oleh Alvin Toffler disebut gelombang ketiga, atau oleh John disebut zaman pasca industri, memerlukan pendidikan yang berbeda dengan pendidikan pada zaman sebelumnya, kajian masyarakat masa depan semakin penting.

Lihatlah ketika Ki Hajar Dewantara berbicara tentang "Tut Wuri Handayani" atau tetang "Ing ngarso Sung tulodo, ing madio mangun karso", kristalisasi kearifan ini memang kurang di pahami bahkan sukar diucapkan oleh lidah bukan jawa.

Banyak menteri pendidikan yang membawa arah pendidikan menurut ismenya masing-masing, di mulai sejak berakhirnya masa Ki Hajar Dewantara, Priyono, Mashuri, Nongroho Noto Susanto, Wardiman dan seterusnya sampai pada menteri pendidikan yang sekarang. Ketika dimasa lalu ada menteri pendidikan yang menganggap bahwa tidak bijak

menyerahkan pendidikan kepada para guru semata, maka sekaranglah dan di sinilah justru terbukti bahwa berbahaya untuk mempercayakan pendidikan bangsa ini hanya kepada seorang menteri pendidikan mendadak sontak menjadi serba bisa. Sikap memiliki hak istimewa ini jelas tidak sehat, tetapi masih belum seberapa bila dibandingkan dengan akibat yang lebih parah yang mungkin terjadi.

Memang tidak harus salah apabila menteri baru mengganti kebijakan menteri pendahulunya, juga tidak harus salah apabila ada seorang menteri mengganti kebijakannya sendiri bekal-kali. Persolan yang lebih fundamental apakah kebijakan bagian dari kebutuhan survival bangsa, dan apakah kebiasaan itu telah disepakati oleh seluruh bangsa sebagai konsensus bangsa sebagai konsensus nasional.

Para pendidik yang masih percaya bahwa pembangunan sebuah bangsa tidak dapat berlangsung tanpa pendidikan, tidak berdiri sendiri. Sudah mulai berkembang persepsi bahwa masalah pendidikan adalah juga masalah survival bangsa, yang melibatkan setiap orang. Implikasinya tidak ada lagi orang yang dapat begitu saja memasabodohkan pendidikan, termasuk mereka semua yang berpotensi untuk mempengaruhi jalan sejarah, tetapi secara actual lebih banyak merusak dari pada membangun.

Semua secara terbuka, mengakui bahwa pendidikan yang berkualitas adalah

prasyarat pembangunan. Tetapi hampir semua pandangan yang mendasar itu menjadi sirna apabila kita melihat pada realitas yang terjadi. Dunia pendidikan masih tetap merana, dan nasib para pendidiknya masih belum baik. Diantara penyebabnya adalah:

- Pendidik yang dituntut hidup menyerupai malaikat, seringkali bertugas dalam sebuah habitat di bawah standar yang menghina harga sebuah profesi.
- Sistem aktual dan praksis pendidikan yang masih berbasis tradisi dengan paradigma bertahan, cenderung memperparah sistem dan praktek kegagalan secara berkelanjutan.
- Komitmen birokrasi mengenai perubahan terhadap pendidikan masih terlalu lemah.
- Iklim sosial politik di tingkat makro belum penuh mendukung pembauran karena kecuali bahwa masyarakat luas tidak bersungguh-sungguh memahami problematik pembauran yang dihadapi, sebagian nampak seperti tidak sungguh-sungguh percaya bahwa pendidikan masih dapat muncul sebagai potensi penyeramat bangsa dari krisis, keterbelakangan, dan kemerosotan.
- Arah perkembangan pendidikan masih kurang jeras bagi semua, walaupun di dalam undang-undang



terah terdapat rumusan umum tentang visi pendidikan. sifatnya memang masih terlalu abstrak, kalau tidak cenderung verbalistik, atau terjat dalam paradoks dan tirani kata-kata, sehingga hampir-hampir tidak berarti apa-apa bagi mereka yang bertugas menerjemahkan kebijakan ke dalam kenyataan.

Kita sedang berada di dalam orbit ke gagal, orbit itu tercipta sebagai akibat dari kelengahan kita untuk sejak semula menciptakan orbit keberhasilan. Tetapi kondisi yang dihadapi belum memuaskan antara lain karena:

Pertama, Dunia pendidikan sudah terbiasa hidup bertahan. Kebiasaan berbagai lembaga pendidikan, para pengelola, serta sejumlah guru yang terkait, bergerak di dalam tradisi dan iklim bertahan yang sudah dikenal sejak lama. Ini menyebabkan mereka telah mampu menyesuaikan diridengan tuntutan iklim tersebut.

Kedua, dunia pendidikan tidak tahu bagaimana berubah. Keinginan untuk berubah seringkali terhalang oleh kenyataan bahwa para pendidikan sendiri seperti tidak mengetahui alternatif apa yang lebih baik yang harus dipilih sebagai pengganti yang sudah ada.

Ketiga, dunia pendidikan merasa trancam oleh perubahan. Para pendidik sendiri seringkali sudah tidak

memperhitungkan konsekuensi dan berbagai resiko rainnya yang mungkin akan timbul dari alternatif baru, dibandingkan dengan keyakinan dan kepercayaan mereka terhadap iklim lama yang sudah lama dijinakkan, yang memberi rasa aman.

### Pendidikan Multikultural



- Teori Kurikulum
- Aksi Sosial
- Analisis Historis
- Budaya dan ras dalam
- Analisa buku-buku pelajaran
- Budaya populer Kompetensi
- Budaya sekolah
- Pengembangan
- Pengaruh budaya dalam
- Identitas etnis/sub-cara belajar mengajar
- Budaya etnis/sub-etnis
- Kemajuan Belajar Peserta Didik
- Pemberantasan

Berbagai Prasangka



Perbedaan budaya merupakan sebuah konduksi dalam hubungan interpersonal. sebagai contoh ada yang orang yang bila diajak bicara (pendengar) dalam mengungkapkan perhatiannya cukup dengan mengangguk-anggukan kepala sambil berkata "uh. huh". Namun dalam kelompok lain untuk menyatakan persetujuan cukup dengan mengedipkan kedua matanya. Dalam beberapa budaya, individu-individu yang berstatus tinggi biasanya yang memprakarsai, sementara individu yang statusnya rendah hanya menerima saja sementara dalam budaya lain justru sebaliknya. Beberapa psikolog menyatakan bahwa budaya menunjukkan tingkat intelegensi masyarakat. sebagai contoh, gerakan lemah gemulai merupakan ciri utama masyarakat Bali. Oleh karena kemampuannya untuk menguasai hal itu merupakan ciri dari tingkat intelligensinya. Sementara manipulasi dan rekayasa kata dan angka menjadi penting dalam masyarakat Barat. Oleh karenanya "keahlian" yang dimiliki seseorang itu menunjukkan kepada kemampuan intelegensinya.

Paling tidak ada tiga kelompok sudut pandang yang biasa berkembang dalam menyikapi perbedaan identitas kaitannya dengan konflik yang sering muncul. pertama, pandangan primordialis. Kelompok ini menganggap, perbedaan-perbedaan yang berasal dari genetika seperti suku, ras (dan juga agama)

merupakan sumber utama tahirnya benturan-benturan kepentingan etnis maupun agama. Kedua, pandangan kaum instrumentalis. Menurut mereka, suku, agama dan identitas yang lain dianggap sebagai alat yang digunakan individu atau kelompok untuk mengejar tujuan yang lebih besar, baik dalam bentuk materi maupun nonmateri. Konsepsi ini lebih banyak digunakan oleh politisi dan para elit untuk mendapatkan dukungan dari kelompok identitas. Dengan meneriakkan "Islam" misalnya, diharapkan semua orang Islam merapatkan barisan untuk mem-back up kepentingan politiknya. Oleh karena itu, dalam pandangan kaum instrumentalis, selama setiap orang mau mengalah dari preference yang dikehendaki elit, selama itu pula benturan antar kelompok identitas dapat dihindari bahkan tidak terjadi. Ketiga, kaum konstruktivis, yang beranggapan bahwa identitas kelompok tidak bersifat kaku, sebagaimana yang dibayangkan kaum primordialis. Etnisitas, bagi kelompok ini, dapat diolah hingga membentuk jaringan relasi pergaulan sosial. Karenanya, etnisitas merupakan sumber kekayaan hakiki yang dimiliki manusia untuk saling mengenal dan memperkaya budaya. Bagi mereka, persamaan adalah anugrah dan perbedaan adalah berkah. Dalam konteks pendapat yang ketiga, terdapat ruang wacana tentang multikulturalisme dan pendidikan multikultural sebagai sarana membangun toleransi atas keragaman. Wacana ini mulai

ramai terdengar di kalangan akademis, praktisi budaya.

Menurut Tilaar, pendidikan multikultural berawal dari berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang "interkulturalisme", sesuai perang dunia II. Kemunculan gagasan dan kesadaran "interkulturalisme" ini selain terkait dengan perkembangan politik internasional menyangkut HAM, kemerdekaan dari kolonialisme, dan diskriminasi rasial dan lain-lain, juga karena meningkatnya pluralitas di negara-negara Barat sendiri sebagai akibat dari peningkatan migrasi dari negara-negara baru merdeka.

Mengenai fokus pendidikan multikultural, Tilaar mengungkapkan bahwa dalam program pendidikan multikultural, fokus tidak lagi diarahkan semata-mata kepada kelompok rasial, agama dan kultural domain atau mainstream. Fokus seperti ini pernah menjadi tekanan pada pendidikan interkultural yang menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi individu-individu yang berasal dari kelompok minoritas terhadap budaya mainstream yang dominan, yang pada akhirnya menyebabkan orang-orang dari kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat mainstream.

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa: Pendidikan adalah: usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik selera aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spirifual keagamaan, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Kekuasaan adalah: pemerintahan dengan birokrasi ataupun kekuasaan kaum konglomerat, atau kekuasaan yang dipegang oleh seseorang atau kekuasaan lainnya. Jika berbicara tentang masalah kekuasaan sangat menarik terutama dalam masyarakat modern, karena hampir seruruh aspek kehidupan manusia dipengaruhi oleh kekuasaan.

Aktivitas di masa pembangunan di era globalisasi, pada awalnya dimulai dari grobalisasi dalam bidang informasi, di mana batas antar negara menjadi semakin maya, karena grobalisasi informasi dapat menembus batas-batas wilayah tersebut. Globalisasi informasi pada akhirnya diikuti pula dalam bidang -bidang kehidupan lainnya, baik bidang ekonomi, politik, sosial budaya tak terkecuali bidang pendidikan mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Multikulturalisme dan pendidikan murtikultural sebagai sarana membangun toreransi atas keragaman, program pendidikan multikultural, fokus tidak lagi diarahkan semata-mata kepada kelompok rasial, agama dan kultural domain atau mainstream.

Perkembangan pembangunan pendidikan di Indonesia tentu berjalan terus sesuai dengan perubahan zaman, walaupun terkadang perkembangannya terasa lambat, atau cepat pendidikan yang cocok dan berakar pada budaya bangsa yang disesuaikan dengan perkembangan pada era globalisasi yang penuh dengan persaingan, tentu dunia pendidikan juga harus dapat memberikan ketrampilan, pengetahuan, yang berkualitas tinggi untuk dapat bersaing dalam era globalisasi, sistem pendidikan dengan multikultural merupakan alternatif yang dapat diterima.

Diskusi di dalam Seminar FORMOPPI. Bandung 2005

Tilaar, H. A.R. Pendidikan dan Kekuasaan. Magelang: Indonesia Tera. 2003

Tilaar, H. A.R. Multikulturalisme. Jakarta : Grasindo. 2004

UPI. Arah Baru Pengembangan Ilmu Pendidikan. Semiloka. Bandung: 2005

#### **DAFTAR PUSATAKA**

Darwis A Sulaiman, Prof. MA. Ph. D. Filsafat Pendidikan Barat. Syiah Kuala University Press. Darussalam Banda Aceh. 1997

Davies, Ivor K. Pengelolaan Belajar (Terjemahan Sudarsono S dkk) Jakarta : CV. Rajawali dan PAU-UT. 1987

Dimiyati Muhammad. Landasam Kependidikan Suatu Pengantar Pemikiran Keilmuan tentang Pendidikan. Jakarta Depdikbud. 1998

Raka Joni, T.S. Wawasan Kependidikan. Jakarta Depdikbud. 1981

Surakhmad, Winarno. Mencari Fokus Pendidikan Yang Hilang. Makalh